

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian yang disampaikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga sejahtera (KS) memberikan beban tugas kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat Tapanuli Utara demi terwujudnya Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Tapanuli Utara. DP2KBP3A Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan upaya dengan baik, seperti melakukan sosialisasi, diantaranya melalui diskusi atau penyuluhan dan penyampaian iklan layanan masyarakat seperti pemasangan baliho atau spanduk dan juga melalui pesan suara dari radio lokal yang ada di Tapanuli Utara.

Untuk Pemasangan alat kontrasepsi, pelayanan ini diberikan kepada pasangan usia subur yang ingin mempunyai keluarga yang sehat, cerdas, mandiri dan sejahtera dengan cara mengendalikan kehamilan. Alat-alat kontrasepsi yang disediakan meliputi pil, kondom, AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), spermisida, implant, dan suntik KB.

Pencegahan Pernikahan dini adalah bagian dari Program Keluarga Berencana. Dalam Pelaksanaannya DP2KBP3A Kabupaten Tapanuli Utara berupaya meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan remaja untuk dapat

menunda usia kawin sampai usia mereka dapat dikatakan matang baik dari kesehatan fisik, psikis, ekonomi maupun sosial.

Dalam Kegiatan pembinaan ketahanan keluarga yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Tapanuli Utara meliputi, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dengan sasaran adalah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I yang memiliki usaha ekonomis.

Untuk Hambatan yang dihadapi oleh DP2KBP3A Tapanuli Utara selain faktor letak geografis dimana jarak-jarak desa yang ada di Daerah Kabupaten Tapanuli Utara berjauhan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam menjangkau setiap desa, hambatan lain datang juga dari masyarakat, dimana pola pikir masyarakat yang masih bersifat tradisional.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran diantaranya bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten (DP2KBP3A) Tapanuli Utara sebagai ujung tombak pada pelaksanaan Program KB dan KS di Daerah Kabupaten Tapanuli Utara harus lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, dan sosialisasinya harus dapat menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara.